

## ALASAN KOSOVO MEMBUKA HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL TAHUN 2020

Rahma Nur Azizah<sup>1</sup>, Etha Pasan, S.IP., MA<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Mulawarman

### Abstrak

Deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia pada tahun 2008 walaupun diakui oleh sebagian besar negara anggota Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Beberapa negara seperti Rusia, Cina termasuk Israel, menolak kemerdekaan tersebut karena memiliki hubungan dekat dengan Serbia. Namun, pada tahun 2020, Kosovo dan Israel, dengan fasilitasi Amerika Serikat, sepakat untuk membuka hubungan diplomatik dan saling mengakui dalam perjanjian normalisasi ekonomi antara Serbia dan Kosovo. Keputusan ini menimbulkan penolakan dari beberapa pihak internasional, termasuk Turki, Uni Eropa, Liga Arab dan masyarakat Kosovo, terutama terkait pembangunan kedutaan besar Kosovo di Yerusalem. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan data sekunder, seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi, untuk mengidentifikasi alasan dibalik keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan Kosovo membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020, didasarkan pada dua kepentingan nasional. Pertama, sebagai upaya pertahanan diri Kosovo terhadap tekanan Amerika Serikat. Kedua, sebagai strategi untuk memperluas pasar ekonomi dengan Israel.

**Kata Kunci:** Kosovo, Israel, Hubungan Diplomatik, Kepentingan Nasional

### Abstract

*The declaration of independence by Kosovo from Serbia in 2008 was recognized by most European Union member states and the United States. However, several countries, such as Russia, China, and including Israel, rejected this independence due to their close ties with Serbia. Nevertheless, in 2020, Kosovo and Israel, facilitated by the United States, agreed to establish diplomatic relations and mutually recognize each other as part of an economic normalization agreement between Serbia and Kosovo. This decision faced opposition from several international parties, including Turkey, European Union, Arab League, and the people of Kosovo, particularly concerning the establishment of the Kosovo embassy in Jerusalem. This research employs an explanatory method using secondary data, such as books, journals, and official documents, to identify the reasons behind this decision. The findings indicate that Kosovo's decision to establish diplomatic relations with Israel in 2020 was based on two national interests. First, as an effort to defend Kosovo against pressure from the United States. Second, as a strategy to expand economic markets with Israel.*

**Keywords:** Kosovo, Israel, Diplomatic Relation, National Interest

## 1. PENDAHULUAN

Kosovo merupakan negara di Balkan yang memerdekakan diri dari Serbia pada 17 Februari 2008 setelah mengalami diskriminasi rasial. Deklarasi kemerdekaan ini diakui oleh Amerika Serikat dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa. Namun, Serbia bersama dengan Rusia, China, dan beberapa negara lain, termasuk Israel, menolak pengakuan tersebut. Penolakan ini didasarkan pada kepentingan geopolitik dan sejarah yang panjang antara negara-negara tersebut dan Serbia (Young, 2021).

Rusia dan China dengan tegas menolak kemerdekaan Kosovo, menyatakan bahwa pengakuan negara-negara Barat terhadap Kosovo adalah sebuah kesalahan yang berpotensi meningkatkan konflik teritorial di kawasan Balkan. Sementara itu,

Israel memiliki alasan sejarah yang kuat, terutama terkait hubungan diplomatiknya dengan Serbia sejak 1991 dan peran Serbia dalam menyelamatkan Yahudi selama Perang Dunia II. Israel memilih untuk tidak mengakui Kosovo demi menjaga hubungan baik dengan Serbia (*Deutsche Welle*, 2008).

Meskipun Israel tidak mengakui Kosovo, Namun pada tahun 2018, Presiden Kosovo, Hashim Thaci secara tidak terduga menawarkan untuk membangun kedutaan besar di Yerusalem jika Israel mengakui Kosovo. Hal ini menunjukkan kesediaan Kosovo untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel (Saputra, 2018). Pada tahun 2020, Kosovo dan Israel akhirnya saling mengakui dan sepakat untuk membuka hubungan diplomatik resmi nantinya. Pengakuan tersebut menjadi bagian dari perjanjian normalisasi ekonomi Serbia dan Kosovo tahun 2020, termasuk juga rencana pemindahan kedutaan besar Serbia ke Yerusalem. Namun, keputusan ini menuai kontroversi karena Serbia merasa tidak dihormati oleh Israel jika hubungan dengan Kosovo tetap berjalan (Ahren, 2020).

Penolakan atas rencana Kosovo membuka kedutaan besar di Yerusalem juga datang dari Turki, yang merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008. Turki berpendapat bahwa langkah ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan dapat merusak hubungan Kosovo dengan Turki (Warta Ekonomi, 2021). Selain itu, Uni Eropa juga memperingatkan bahwa tindakan Kosovo dapat merusak aspirasinya untuk bergabung dengan Uni Eropa (Haaretz, 2021). Masyarakat Kosovo, yang mayoritas beragama Islam, juga menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap hubungan diplomatik dengan Israel, khususnya terkait pembukaan kedutaan di Yerusalem (Azzam, 2021).

Namun, meskipun terdapat kecaman internasional dan penolakan masyarakatnya, Kosovo tetap melanjutkan rencananya dan resmi membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada 1 Februari 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dibukanya hubungan diplomatik Kosovo dengan Israel tahun 2020.

## **2. METODE**

Dalam penelitian ini, dipergunakan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif bertujuan menjelaskan alasan dari suatu fenomena pada peristiwa yang akan diteliti, dimana penelitian ini berusaha menjelaskan alasan Kosovo membuka hubungan diplomatik dengan Israel di tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada alasan yang melatarbelakangi Kosovo membuka hubungan diplomatik dengan Israel di tahun 2020, lalu membuka hubungan resmi dengan Israel di tahun 2021 dengan dibangunnya kedutaan besar Kosovo di Yerusalem, sekalipun mendapatkan penolakan dari beberapa pihak yaitu Turki, Serbia, Liga Arab, Uni Eropa serta masyarakat Kosovo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, arsip, dan dokumen resmi, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka,

yang mengandalkan data sekunder dari sumber-sumber tertulis yang kredibel, seperti artikel, jurnal, dan literatur buku, tanpa melakukan penelitian lapangan langsung.

### 3. PEMBAHASAN

#### KONFLIK KOSOVO-SERBIA

Konflik teritorial antara Kosovo dan Serbia bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada 1912, ketika wilayah Kosovo diserahkan kepada Kerajaan Serbia. Pada tahun 1918, Serbia bergabung dengan Kroasia dan Slovenia untuk membentuk Kerajaan Yugoslavia. Seiring waktu, pada tahun 1974, Kosovo diberi otonomi khusus oleh Yugoslavia, yang mencakup hak untuk memiliki administrasi sendiri, majelis peradilan, serta satuan polisi. Ketegangan muncul ketika Serbia khawatir bahwa Kosovo akan memisahkan diri dan menuntut status republik penuh (Ningsih, 2023).

Pada tahun 1989, di bawah kepemimpinan Presiden Slobodan Milosevic, Serbia membatasi otonomi Kosovo dan mencabut hak-hak khususnya untuk mencegah Kosovo memisahkan diri. Kebijakan ini memicu tindakan diskriminasi terhadap masyarakat muslim Kosovo, yang mengarah pada terbentuknya kelompok perlawanan bersenjata bernama *Kosovo Liberation Army* (KLA) pada tahun 1990. Tindakan Milosevic terhadap etnis Muslim Kosovo semakin memperparah ketegangan. Pemerintah Serbia melakukan pembersihan etnis yang menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan etnis Muslim Kosovo. KLA berusaha melawan untuk memperjuangkan kemerdekaan, namun pemerintah Serbia merespon dengan kekerasan yang lebih ekstrem, termasuk genosida (Ningsih, 2023).

Pada tahun 1999, NATO mencoba menengahi konflik melalui Perjanjian Rambouillet, yang bertujuan memberikan otonomi bagi Kosovo serta menghadirkan pasukan penjaga perdamaian NATO. Namun, Serbia menolak proposal tersebut karena dianggap mengancam kedaulatan Yugoslavia. Akibatnya, NATO melancarkan serangan udara terhadap Serbia, yang berlangsung selama 78 hari dan memaksa Serbia menarik pasukannya dari Kosovo. Setelah kesepakatan di tahun 1999, PBB melalui *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK) bersama NATO mengawasi Kosovo dengan menghadirkan pasukan penjaga perdamaian (KFOR). Kosovo berada di bawah pengawasan internasional untuk mencegah terulangnya kekerasan. Namun, status final Kosovo belum dapat diselesaikan (Hosmer, 2001).

Pada tahun 2006, mediasi antara Serbia dan Kosovo dilakukan oleh diplomat Finlandia Martti Ahtisaari, yang difasilitasi oleh PBB. Mediasi ini menghasilkan proposal kemerdekaan terbatas bagi Kosovo. Namun, Serbia menolak proposal tersebut, sehingga status Kosovo tetap tidak terpecahkan secara formal. Pada 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. International Steering Group for Kosovo dibentuk untuk membantu perkembangan demokrasi di Kosovo, sementara Uni Eropa mengirim misi EULEX untuk membantu Kosovo dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan. Serbia menolak pengakuan kemerdekaan Kosovo dan berargumen bahwa deklarasi tersebut melanggar Hukum Internasional

serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 yang menganggap bahwa kedaulatan Kosovo masih dibawah Republik Yugoslavia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Rusia, sebagai sekutu dekat Serbia, mendukung posisi ini dan menggunakan hak veto di PBB untuk menentang pengakuan Kosovo, membuat Kosovo sulit diterima sebagai anggota PBB. Pada 22 Juli 2010, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional (A'Mula, 2009).

Meski begitu, Serbia terus melobi negara-negara lain untuk menolak pengakuan Kosovo, yang mengakibatkan beberapa negara mencabut pengakuan mereka terhadap kemerdekaan Kosovo pada periode 2017-2020. Terdapat setidaknya 15 negara yang menarik pengakuan kemerdekaan Kosovo. Atas dasar tersebutlah penyelesaian konflik yang telah disepakati sebelumnya oleh Kosovo dan Serbia tetap mengalami kesulitan dan tidak mencapai titik terang dan menghambat implementasi beberapa kesepakatan telah yang dicapai yang antar kedua negara tersebut (Cakolli, 2020).

## **PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK KOSOVO ISRAEL**

Walaupun konflik antara Kosovo dan Serbia masih belum terselesaikan, dan meskipun terdapat penurunan jumlah pengakuan kemerdekaan Kosovo oleh negara lain akibat kampanye anti-Kosovo yang dilancarkan Serbia, mengakibatkan 15 negara mencabut pengakuan tersebut, Israel akhirnya menjadi negara ke-117 yang mengakui Kosovo pada tahun 2020, setelah mengalami kekosongan pengakuan selama kurang lebih dua tahun (CNN, 2021).

Kosovo sebelumnya ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, namun Israel sempat ragu karena memiliki hubungan dekat dengan Serbia. Serbia, yang mendukung kemerdekaan Israel sejak 1948, memiliki sejumlah kerjasama strategis dan ekonomi dengan Israel. Hal ini membuat Israel mempertimbangkan ulang keputusan untuk mengakui Kosovo demi menjaga hubungan baiknya dengan Serbia. Selain itu, Israel harus mempertimbangkan dampak pengakuan Kosovo terhadap situasi politik di Timur Tengah, khususnya terkait konflik Israel-Palestina (Karcic, 2021).

Pada 2018, Presiden Kosovo, Hashim Thaçi, secara mengejutkan menjanjikan untuk memindahkan kedutaan besar Kosovo ke Yerusalem jika Israel mengakui kemerdekaan Kosovo. Hal ini menunjukkan kesediaan Kosovo untuk mendukung klaim Israel atas Yerusalem sebagai Ibu Kota, yang sekaligus menjadi strategi diplomasi yang menarik bagi Israel (Saputra, 2018).

Akhirnya, Kosovo dan Israel mencapai kesepakatan pengakuan pada 4 September 2020, bertempat di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Adapun momen pengakuan Kosovo dan Israel, tertuang pada klausul perjanjian ekonomi Kosovo-Serbia di tahun 2020, yang sebenarnya diluar dari pembahasan mengenai normalisasi ekonomi Kosovo dan Serbia. Disisilain Amerika Serikat menjadi fasilitator dalam kedua agenda tersebut. Adanya perjanjian yang melegitimasi pengakuan Kosovo dan Israel ini dilihat sebagai bagian dari upaya Amerika Serikat

untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan dan mendukung posisi Israel di panggung internasional (Hajdari, 2021).

Setelah penandatanganan hubungan diplomatik secara virtual pada 1 Februari 2021, Kosovo akhirnya secara resmi membuka kedutaan besarnya di Yerusalem pada 14 Maret 2021. Pembukaan kedutaan ini menegaskan komitmen Kosovo untuk menjalin hubungan erat dengan Israel, serta menggarisbawahi pentingnya pengakuan internasional bagi kedua negara (CNN, 2021).

## **RESPON INTERNASIONAL TERHADAP PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR KOSOVO DI YERUSALEM**

Pembukaan hubungan diplomatik Kosovo dan Israel nyatanya diikuti dengan rencana pembangunan kedutaan besarnya di kota Yerusalem. Sebagaimana diketahui, bahwa pembukaan tersebut menjadi suatu pelanggaran dikarenakan status Yerusalem yang masih belum ditentukan dan harus menjadi bagian dari negosiasi antara Israel dan Palestina. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan NO.478 pada poin ke 5 yang melarang negara-negara untuk mendirikan misi diplomatiknya di Yerusalem sebagai kota suci tiga agama (UNSCR, 1980). Tindakan Kosovo ini, kemudian mendapatkan respon dari masyarakat internasional. Berikut beberapa respon negara negara yang menolak keputusan Kosovo tersebut;

### **RESPON UNI EROPA**

Hubungan antara Uni Eropa dan Kosovo telah mengalami perkembangan signifikan sejak kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008. Sejak 2012, Kosovo secara berkala mengajukan dokumen perjanjian yang dikenal dengan nama *Stabilization and Association Agreement (SAA)* sebagai langkah untuk memperoleh keanggotaan Uni Eropa. Perjanjian ini berlandaskan pada kriteria Kopenhagen yang ditetapkan pada tahun 1993, yang mencakup tiga aspek utama: politik, ekonomi, dan legislatif. Kriteria ini menjadi tolok ukur kelayakan negara calon anggota Uni Eropa (Nezaj, 2015).

Namun, keputusan Kosovo untuk membuka kedutaan besarnya di Yerusalem telah menimbulkan reaksi negatif dari Uni Eropa. Berdasarkan resolusi PBB No. 478, Uni Eropa menegaskan bahwa status Yerusalem seharusnya diselesaikan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel. Juru bicara Komisi Eropa, Peter Stano, menyatakan bahwa tindakan Kosovo dapat mempengaruhi persetujuan keanggotaan Uni Eropa mengingat tidak ada negara anggota Uni Eropa yang memiliki kedutaan di Yerusalem. Stano juga menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa, yang terdiri dari 27 negara anggota, menuntut agar status Yerusalem diselesaikan melalui dialog yang lebih luas antara Israel dan Palestina (Cook, 2020).

### **RESPON TURKI**

Hubungan persahabatan antara Turki dan Kosovo telah terjalin lama, didasari oleh keterikatan sejarah, budaya, dan politik yang kuat. Kosovo, yang dulunya merupakan bagian dari kekuasaan Kekaisaran Ottoman, serta Kosovo menerima

pengakuan kemerdekaannya dari Turki pada tahun 2008. Sejak saat itu, Turki memberikan dukungan politik yang konsisten kepada Kosovo dalam upaya mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara Merdeka.

Namun, dalam konteks pembukaan kedutaan besar Kosovo di Yerusalem, Turki menyatakan ketidaksetujuan yang tegas. Kementerian Luar Negeri Turki mengemukakan keras keputusan tersebut, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas langkah yang diambil oleh pemimpin Kosovo. Pihaknya sangat prihatin dan mengutuk keras pembukaan Kedutaan Besar Kosovo di Yerusalem. Keputusan yang diambil sangat disayangkan, karena mengabaikan penderitaan rakyat Palestina, yang telah diduduki selama beberapa dekade dan menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia yang serius (*Republic Of Türkiye Ministry Of Foreign Affairs, 2021*).

Turki berargumen bahwa pembukaan kedutaan Kosovo di Yerusalem melanggar proses perdamaian yang ditetapkan oleh Resolusi PBB, yang menyatakan bahwa status Yerusalem adalah netral dan tidak seharusnya ada misi diplomatik dari negara lain di wilayah tersebut, Turki menyerukan kepada pemimpin Kosovo untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan membatalkan langkah yang dianggap tidak bertanggung jawab dan illegal (*Republic Of Türkiye Ministry Of Foreign Affairs, 2021*).

## **RESPON LIGA ARAB**

Pertanggal 2 Februari 2021, sehari setelah Kosovo dan Israel akhirnya secara resmi melakukan hubungan diplomatiknya melalui zoom, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Aboul Gheit juga mengkonfirmasi langsung kepada pemerintahan Kosovo menyatakan ketidaksukaannya dan mengutuk sikap Kosovo terkait rencana pembangunan kedutaan besarnya di Yerusalem. Aboul Gheit menekankan bahwa keputusan tersebut tidak sah, dan merupakan pelanggaran hukum internasional yang menganggap Yerusalem sebagai wilayah pendudukan. Gheit mencatat bahwa hukum internasional melarang pemindahan kedutaan ke wilayah kota Yerusalem (*Arab News, 2021*).

## **RESPON MASYARAKAT KOSOVO**

Adapun respon masyarakat Kosovo yang mayoritas beragama Islam, terhadap keputusan resmi Kosovo dan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik dan membuka kedutaan besar di Yerusalem, menunjukkan adanya reaksi negatif. Behar Beqiri, perwakilan dari masyarakat Muslim Kosovo di Ibu Kota Pristina, menegaskan bahwa tanah Israel adalah wilayah Palestina yang dihuni oleh rakyatnya yang sedang berjuang untuk kemerdekaan. Beqiri menolak pembangunan kedutaan di Yerusalem atau Tel Aviv, berpendapat bahwa pendirian kedutaan di Yerusalem dapat melanggar resolusi PBB yang telah disepakati. Pernyataan ini disampaikan pada 4 Februari 2021, melalui wawancara dengan surat kabar Anadolu Ajansı, setelah Kosovo dan Israel resmi membuka hubungan diplomatik pada 1 Februari 2021 (*Azzam, 2021*).

Meski banyak ditentang terkait pembukaan hubungan diplomatik antara Kosovo dan Israel pada tahun 2020 hingga pembukaan diplomatik resminya di tahun 2021. Keputusan ini menunjukkan kompleksitas dinamika politik dalam konteks

hubungan internasional serta tantangan yang dihadapi Kosovo dalam mewakili kepentingan negaranya dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

## **ALASAN KOSOVO MEMBUKA HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL TAHUN 2020**

Terdapat dua alasan Kosovo membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020, Berdasarkan konsep kepentingan nasional milik Jack D. Plato dan Roy Olton, alasan yang melatarbelakangi Kosovo pertama terletak pada elemen self-preservation berupa adanya tekanan Amerika Serikat. Kedua terletak pada Economic Well-Being dalam bentuk perluasan pasar ekonomi.

### **TEKANAN AMERIKA SERIKAT**

Alasan utama Kosovo ketika mengambil keputusan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel tahun 2020 terletak pada kepentingan untuk mempertahankan diri (*Self Preservation*). Menurut Jack D. Plato dan Roy Olton, Self Preservation merupakan upaya suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dimana keberadaannya menjadi sangat esensial sebagai bentuk pengakuan kepada negara lain, hal ini sangat menjadi penting bagi menjaga kelangsungan hidup negara dalam hubungan internasional (Plano & Olton, 1988).

Kosovo merupakan negara yang memiliki posisi yang kompleks. Hingga Tahun 2024, Kosovo belum diakui oleh Dewan Keamanan PBB sebagai negara merdeka karena perbedaan pendapat diantara anggota tetap PBB (Zulfikar, 2024). Beberapa negara menyatakan kekhawatiran atas karakter unilateral deklarasi kemerdekaan Kosovo, sementara yang lain menolak mengakui Kosovo sebagai negara terpisah dari Serbia. Dewan keamanan PBB masih berpegang pada Resolusi ke 1244 tahun 1999 bahwa Otonomi substansial yang diberikan kepada Kosovo masih dalam kerangka Republik Yugoslavia yang saat ini telah menjadi Serbia dan Montenegro (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Sebagai akibatnya, hal ini berdampak pada legitimasi klaim kemerdekaan dan menghambat stabilitas regional Kosovo.

Sejak awal, Amerika Serikat merupakan negara yang terlibat dalam konflik Kosovo-Serbia lewat partisipasinya dalam keanggotaan di NATO. Adapun maksud Amerika Serikat mendukung perluasan NATO ke wilayah Balkan dengan menurunkan pasukan perdamaian, untuk memecah kepentingan Rusia pada perang dingin yang berada pada pihak Serbia di wilayah Balkan. Sebagai negara yang terlibat dalam konflik Kosovo-Serbia, Amerika Serikat telah secara aktif membangun hubungan erat dengan Kosovo. Dengan memanfaatkan status Kosovo yang belum sepenuhnya diakui secara internasional, Amerika Serikat telah berhasil menciptakan ketergantungan politik bagi Kosovo. Melalui dukungan politik yang kuat, Amerika Serikat tidak hanya berupaya membantu Kosovo termasuk meraih pengakuan dari negara-negara lain, tetapi juga memperkuat pengaruhnya di kawasan Balkan dan secara global (Jegic, 2020).

Pada tahun 2019, Amerika Serikat menunjuk Richard Grenell sebagai Duta Besar Khusus untuk menangani masalah antara Kosovo dan Serbia. Selanjutnya, pada tahun 2020, melalui fasilitasi Amerika Serikat, tercapai kesepakatan dalam

bentuk perjanjian normalisasi ekonomi antara Kosovo dan Serbia sebagai langkah penyelesaian konflik. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa klausul dalam perjanjian tersebut yang tidak memiliki keterkaitan dengan kesepakatan normalisasi ekonomi antara Kosovo dan Serbia. Pertama, kedua negara sepakat dengan 69 negara lainnya untuk mendukung dekriminialisasi kelompok homoseksual, sebagaimana tercantum dalam klausul ke-14. Selain itu, dalam klausul ke-15, Kosovo dan Serbia setuju untuk menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Kemudian, pada klausul ke-16, Kosovo dan Israel akhirnya sepakat untuk saling mengakui. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Serbia juga setuju untuk memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pengakuan Israel terhadap Kosovo akan membuka jalan bagi pembukaan kedutaan besar Israel di Yerusalem, sementara Serbia juga akan mengikuti langkah tersebut dengan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem (Hospita, 2020).

Adanya klausul-klausul diluar normalisasi ekonomi pada perjanjian normalisasi ekonomi Kosovo Serbia tahun 2020, merupakan tujuan Amerika Serikat dalam memperluas pengaruh kepentingannya, pertama terkait agenda dekriminialisasi homoseksualitas diberbagai negara, demi mempromosikan kesetaraan dan hak-hak LGBTQI+ pada era kepemimpinan Presiden Donald Trump. Selanjutnya memperluas informasi mengenai kelompok Hizbullah sebagai kelompok teroris, karena Hizbullah dianggap telah aktif menimbulkan aksi terorisme dan terlibat dalam penggalangan dana dan pencucian uang di Amerika Serikat (Hospita, 2020).

Terakhir pada pembukaan hubungan diplomatik antara Kosovo dan Israel. Amerika Serikat berusaha melobi-lobi negara yang ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, disertai agenda pemindahan dan pembukaan kedutaan besar di Yerusalem, bertujuan membantu Israel dalam memperkuat klaim eksekutif kota Yerusalem (Jegic, 2020).

Pembukaan hubungan diplomatik antara Kosovo dan Israel tentunya menjadi hal yang kontroversial bagi dunia internasional, terlebih dikarenakan pembukaan hubungan diplomatik yang dilakukan Kosovo dengan Israel dibersamai dengan pembukaan kedutaan besar Kosovo yang berada di Yerusalem. Pada pelaksanaannya, perjanjian normalisasi ekonomi antara Kosovo dan Serbia di tahun 2020, walau telah ditandatangani secara masing-masing oleh perwakilan kedua negara, Serbia menyatakan ketidaksetujuan setelah menandatangani perjanjian normalisasi ekonomi dikarenakan klausul terakhir terkait Kosovo yang akhirnya mendapat pengakuan dari Israel. Menurut Serbia, keputusan Israel dalam perjanjian tersebut tidak menghormati Serbia dan perjanjian normalisasi ekonomi antara Kosovo dan Serbia nyata tidak berjalan secara sepihak (Ahren, 2020).

Tekanan yang diberikan Amerika Serikat nyatanya membuat Kosovo harus menyetujui untuk mengakui Israel dan membuka kedutaan besarnya di Yerusalem pasca perjanjian tersebut. Terlepas dari penolakan yang dilakukan beberapa pihak internasional terhadap keputusan tersebut dan penyelesaian konflik Kosovo-Serbia menjadi terhambat. Apabila Kosovo tidak menerima penawaran tersebut, maka ada ketakutan terhadap penarikan dukungan yang telah diberikan Amerika Serikat selama ini. Di sisi lain apabila Amerika Serikat mencabut dukungannya terhadap Kosovo,

maka peluang Kosovo untuk eksis dalam tatanan internasional semakin kecil. Atas dasar pertimbangan tersebut, akhirnya Kosovo mengambil tindakan untuk menyetujui pengakuan dengan Israel di tahun 2020.

Setelah Kosovo membuka hubungan diplomatik dengan Israel di bawah tekanan untuk mempertahankan dukungan politik dari Amerika Serikat, negara tersebut semakin memperkuat dukungannya terhadap Kosovo. Pada tahun 2022, saat perayaan hari kemerdekaan Kosovo yang ke-14, Duta Besar Amerika Serikat untuk Kosovo, Hovenier, menyatakan dukungan penuh untuk membantu Kosovo berperan aktif di kawasan ini dan terintegrasi dalam lembaga-lembaga Eropa. Hal ini mencakup upaya mencapai kesepakatan yang lebih luas dengan Serbia, yang berfokus pada pengakuan bersama tanpa mengorbankan kedaulatan, integritas teritorial, atau melanggar konstitusi Kosovo (*U.S. Embassy Kosovo, 2022*). Pada bulan April 2024, Amerika Serikat Kembali memberikan dukungan politiknya kepada Kosovo melalui Duta Besar Robert Wood dalam pidatonya di forum Dewan Keamanan PBB mengenai Kosovo. Wood mengkritik tindakan paramiliter Serbia yang menyerang kepolisian di wilayah utara Kosovo pada peristiwa bulan Oktober, 2023. Wood mendesak agar Serbia bertanggung jawab sesuai dengan aturan hukum dan bekerja sama dengan KFOR (*Kosovo Force*) untuk mencegah terulangnya serangan yang mengakibatkan korban di kalangan warga Kosovo (*United States Mission to the United Nations, 2024*).

## PERLUASAN PASAR EKONOMI

Adapun alasan kedua pada pembukaan hubungan diplomatik Kosovo dan Israel di tahun 2020 berdasarkan pada kepentingan nasional Kosovo yaitu *Economic Well-being*, untuk menjaga stabilitas negara melalui perluasan pasar ekonomi. Elemen ekonomi dalam kepentingan nasional merupakan alasan fundamental dalam menjaga stabilitas negara, yang mana hal ini sangat penting dalam mempengaruhi kemajuan suatu negara (Plano & Olton, 1998).

Dalam penelitian ini, pembukaan hubungan diplomatik antara Kosovo dan Israel melalui penandatanganan bersama menjadikan adanya pengakuan resmi antar kedua negara, hal ini menjadi dasar hukum untuk potensi kerjasama lanjutan. Sehingga kedepannya hubungan kedua negara akan mempengaruhi kerjasama yang disepakati, antara lain kerjasama ekonomi, kerjasama keamanan, kerjasama regional, dan beberapa kerjasama lainnya (Syahmin, 1988).

Kondisi perekonomian Kosovo di tahun-tahun awal kemerdekaan mengalami banyak tantangan dan hambatan. Mulai dari rusaknya infrastruktur dalam negara akibat dari efek perang dengan Serbia yang terjadi di tahun 1998-1999, ketidakstabilan politik dalam maupun luar negeri yang dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan Serbia sebagai bentuk tidak terima terhadap kemerdekaan Kosovo, serta tingginya tingkat pengangguran yang mencapai angka 35% dari 1,8 juta penduduk produktif Kosovo (VOA, 2014).

Hambatan pada perekonomian tersebut membuat Kosovo menjadi salah satu negara termiskin di antara negara Eropa lainnya. Ditambah dengan adanya praktik korupsi pejabat Kosovo yang menghambat stabilitas ekonomi negaranya. Hal ini dibuktikan dengan adanya daftar yang dikeluarkan oleh organisasi nirlaba

Transparency International yang menempatkan Kosovo pada urutan ke 111 dari seluruh negara dalam indeks korupsi di tahun 2013 (VOA, 2014).

Adanya upaya pembukaan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Kosovo tidak hanya semata-mata untuk memperoleh pengakuan resmi dari negara-negara lain, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk mengembangkan perekonomian negara. Melalui kerja ekonomi dengan negara-negara yang mengakui kedaulatannya, Kosovo bermaksud untuk memperluas akses pasar, meningkatkan pendapatan nasional, dan sekaligus mengatasi permasalahan pengangguran yang menjadi isu krusial bagi negara tersebut (*BANKA QENDORE E REPUBLIKËS SË KOSOVË*, 2021).

Selama ini, investasi asing merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang sangat diandalkan oleh Kosovo, kepada negara yang mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan negaranya. Negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Kosovo seperti Jerman, Turki, dan Amerika Serikat, telah memberikan kontribusi signifikan melalui investasi di berbagai sektor. Jerman, misalnya, fokus pada sektor properti, sementara Turki lebih berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur. Amerika Serikat memiliki kehadiran yang lebih luas, mencakup sektor properti, perbankan, infrastruktur, kerja sama ekonomi, dan pemanfaatan energi (*BANKA QENDORE E REPUBLIKËS SË KOSOVË*, 2021).

Adapun faktor-faktor yang mendukung Kosovo dalam memperluas pasarnya melalui investasi asing adalah letak geografis yang berada di tengah-tengah wilayah Balkan, yang dapat memberikan akses penting ke berbagai negara di sekitarnya. Adanya kerjasama ekonomi yang terjalin melalui investasi asing antar negara-negara yang telah mengakui Kosovo, dilakukan melalui beberapa kerjasama bilateral (*BANKA QENDORE E REPUBLIKËS SË KOSOVË*, 2021). Dengan melakukan hal tersebut, Kosovo melihat sebuah peluang untuk melakukan perluasan pasar yang menjanjikan apabila Kosovo membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini tentunya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Di sisi lain, Israel juga telah memperluas pasar ekonominya melalui investasi asing dengan Kosovo, sebelum terjalinnya hubungan diplomatik dari satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta Israel bernama Enlight Renewable Energy. Perusahaan *Enlight Renewable Energy* nyatanya telah berinvestasi untuk proyek energi terbarukan dengan sumber daya angin berkapasitas setara 105 megawatt di Kosovo. Proyek ini dinamai Selac Project, diinisiasi pada tahun 2018 untuk membangun 27 turbin angin sebagai tenaga listrik. Dengan adanya proyek ini, keuntungan yang didapatkan oleh Israel di tahun pertama proyek berjalan berkisar di angka 31,000,000 juta Dolar AS (Yeshayahou, 2018). Dilihat dari adanya kerjasama yang telah terjalin berupa investasi asing sebelumnya, Kosovo memiliki peluang besar untuk memperluas pasar ekonominya lebih lanjut, apabila Kosovo dapat membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel.

Setelah pembukaan hubungan diplomatik Kosovo dan Israel di tahun 2020, kedua negara akhirnya sepakat menjalin kerjasama bilateral. Kerjasama tersebut adalah kerjasama ekonomi yang dikenal dengan nama *Kosovo Israel Development Investment Corporation* (KIDIC). KIDIC diinisiasi pada tahun 2021, pasca pembukaan

resmi hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Program ini dirancang oleh Hilik Bar yang memiliki latar belakang sebagai mantan anggota parlemen Israel. Tujuan utama dari adanya program KIDIC selain memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara juga memiliki fokus terkait integritas pasar-pasar yang sedang berkembang di ekonomi global melalui adanya promosi perdagangan (KIDIC, 2021).

KIDIC merupakan sebuah program yang didesain untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan komersial antara Israel dan Kosovo. Sistem dari program ini bersifat menaungi perusahaan-perusahaan di Israel dan Kosovo maupun perusahaan asing yang berkeinginan bergabung dalam program KIDIC, untuk fokus pada integrasi pasar agar berkembang ke kancah internasional dengan mempromosikan perdagangan, menciptakan hubungan, dan memelihara hubungan komunikasi yang teratur (KIDIC, 2021).

Beberapa fokus sektor yang diutamakan dalam program KIDIC antara lain, sektor teknologi informasi dan perluasan jaringan internet. Selanjutnya sektor tanggap bencana yang berfokus pada persiapan, penanganan, dan pemulihan setelah terjadinya bencana atau keadaan darurat. Terakhir ada pada sektor energi yang berfokus pada minyak, diesel, bensin dan bahan bakar pesawat (*Jet fuel*) (KIDIC, 2021).

Sejak tahun 2021 hingga 2024, program KIDIC telah gencar berusaha menarik minat investor asing, tidak hanya dari Kosovo dan Israel, tetapi juga dari berbagai negara lain. Program KIDIC akhirnya berhasil menggaet sejumlah perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan bisnis mereka. Sebagai contoh, pada tanggal 23 November 2021, Quantix L.L.C, sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak asal Kosovo yang dipimpin oleh Betim Drenica sebagai *Chief Executive Officer*, dan Sela, perusahaan pengembang perangkat lunak asal Israel yang dipimpin oleh Ron Sprinzak sebagai *Chief Executive Officer*, telah resmi bergabung dalam program KIDIC. Keduanya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan *Chief Executive Officer KIDIC*, Damian Brikman (KIDIC, 2021).

Selanjutnya, Pada tanggal 17 Maret 2022, Menorah Ekidu, perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi bisnis dan perdagangan internasional asal Makedonia, telah mengadakan pertemuan dengan pihak KIDIC. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan Menorah Ekidu untuk bergabung dalam program KIDIC. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Labinot Ademi selaku *Chief Executive Officer* Menorah Ekidu dan Damian Brikman selaku *Chief Executive Officer KIDIC* (Jonshala, 2022).

Lalu, dalam pertemuan pada tanggal 24 Agustus 2022, Marianna Pinczés, selaku *Chief Executive Officer* Grapoila, sebuah perusahaan minyak gourmet, dan Damian Brikman, *Chief Executive Officer KIDIC* telah membahas peluang kerjasama. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan Grapoila untuk bergabung dalam program KIDIC. Dengan bergabung, Grapoila mendapatkan akses ke pasar Kosovo dan Israel. Program KIDIC juga berhasil memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan produk-produk minyak gourmet Grapoila di kedua negara tersebut maupun pada pasar global (Jonshala, 2022).

Meskipun informasi mengenai anggaran dan laporan tahunan program KIDIC belum dipublikasikan secara luas, namun hingga tahun 2024, terdapat beberapa mitra yang telah bergabung dalam program KIDIC selain yang telah dijelaskan di atas, yaitu AIDIC (*Albanian Israel Development and Investment Corporation*), AUEFON (*American University of Europe*), SCOPE Strategic Management, AL-PHARM, EXCLUSIVE, FLOIL, COMMERCE JOURNEY, AL-SOUFI, SHARPFITS, Reckitt, EWAVE MEDICAL, SHAYALAH Trade (KIDIC, 2024).

KIDIC juga turut melakukan pertemuan yang bertujuan mempromosikan programnya kepada beberapa perwakilan negara lain. Hal ini terlihat dari pertemuan yang diadakan oleh Hilik Bar, pendiri KIDIC, dengan Menteri Administrasi Publik Montenegro, Marash Dukaj, pada 15 September 2022. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempromosikan kerja sama di berbagai bidang, guna memperkuat hubungan antara Kosovo, Israel, dan Montenegro. Selanjutnya Hilik Bar juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Albania, Niko Peleshi di tanggal 29 November 2022. Selama pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai hal yang menarik dan kebutuhan negara di bidang-bidang seperti keamanan siber dan pertahanan (Jonshala, 2022).

Program KIDIC dari 2021-2024 nyatanya telah mengalami perkembangan yang signifikan dilihat dari jumlah investor yang terus bertambah hingga tahun 2024. Pendiri KIDIC, Hilik Bar dan Damian Brikman selaku *Chief Executive Officer* beserta anggota yang bergabung dalam program KIDIC, akan terus menjalankan dan mempromosikan program tersebut secara global, sebagai bagian dari tanggung jawab untuk terus memperkuat hubungan diplomatik yang telah terjalin antara Kosovo dan Israel, demi memperluas pasar ekonomi antar kedua negara.

Dalam proses pembukaan hubungan diplomatik Kosovo dan Israel pada tahun 2020, peluang adanya perluasan pasar ekonomi nyatanya tidak hanya dalam skala kedua negara, namun membuka peluang pada pasar global. Demi memenuhi tujuan tersebut, Kosovo memerlukan sebuah tindakan yang dapat melegitimasi keinginannya untuk menjalin kerjasama, maka dari itu Kosovo menimbang bahwa perlu untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel agar kepentingan nasionalnya terpenuhi. Hal ini kemudian yang menjadi alasan Kosovo membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa alasan Kosovo untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020, pertama dipengaruhi oleh tekanan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam perjanjian normalisasi ekonomi antara Kosovo dan Serbia tahun 2020, dengan memasukkan agenda pembukaan hubungan diplomatik sebagai bagian dari perjanjian tersebut. Dengan memanfaatkan ketergantungan Kosovo pada dukungan politiknya, Amerika Serikat berhasil mendorong Kosovo untuk mengakui Israel dan Yerusalem sebagai Ibu Kota. Kedua, pembukaan hubungan diplomatik Kosovo dan Israel tahun 2020, nyatanya dapat mengakses pasar ekonomi yang lebih luas. Hal ini

terlihat dari dibukanya kerjasama dalam sektor teknologi dan perluasan jaringan, manajemen bencana, dan energi yang masuk dalam program kerjasama investasi antara Kosovo dan Israel bernama KIDIC (*Kosovo Israel Development & Investment Corporation*) pada tahun 2021. Terhitung hingga tahun 2024, terdapat beberapa perusahaan lokal Kosovo, Israel hingga negara lain yang ikut berkontribusi dalam kerjasama tersebut sesuai dengan sektor yang telah dibuka dalam program KIDIC.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahren, Raphael. "Serbia won't open Jerusalem embassy if Israel recognizes Kosovo – Serbian source," *The Time of Israel*, 9 September 2020, <https://www.timesofisrael.com/serbia-wont-open-jerusalem-embassy-if-israel-recognizes-kosovo-serbian-source/>.
- A'Mula, Shegal. "Russia to Support Serbia at ICJ," *Balkan Insight*, 7 Oktober 2009, <https://balkaninsight.com/2009/10/07/russia-to-support-serbia-at-icj/>
- Arab News, "Arab Parliament condemns Kosovo's recognition of Jerusalem as Israel's capital," 3 Februari 2020, <https://www.arabnews.com/node/1802931/middle-east>
- Azzam, Muhammad Abdullah. "Masyarakat Kosovo tak setuju dengan pembukaan kedutaan di Yerusalem," *Anadolu Ajansı*, 4 Februari 2021, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/masyarakat-kosovo-tak-setuju-dengan-pembukaan-kedutaan-di-yerusalem/2133233>
- BANKA QENDORE E REPUBLIKËS SË KOSOVË. 2021 "Raporti Vjetor 2021" Prishtine, Qershore 2023, BQK\_RV\_2022.pdf (bqk-kos.org)
- Cakolli, Eugen, "KOSOVO: Between universal non-recognition and derecognations" KONRAD ADENAUER STIFTUNG, 13 September 2020, <https://www.kas.de/en/web/kosovo/single-title/-/content/kosova-mes-mosnjohjes-universale-dhe-cnjohjeve>
- CNN Indonesia, "Kosovo Buka Hubungan dengan Israel, Akui Yerusalem," 2 Februari 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210202132219-134601273/kosovo-buka-hubungan-dengan-israel-akui-yerusalem>.
- Cook, Lorne. "EU warns Serbia, Kosovo over Israel embassy move," *ap news*, 8 September 2020, EU warns Serbia, Kosovo over Israel embassy move | AP News
- Deutsche Welle, "Kosovo Menyatakan Kemerdekaan," 17 Februari 2008, <https://www.dw.com/id/kosovo-menyatakan-kemerdekaan/a-3132580>
- Haaretz. "EU Warns Serbia, Kosovo Over Unexpected Israel Embassy Move," 7 September 2020, EU Warns Serbia, Kosovo Over Unexpected Israel Embassy Move - Europe - Haaretz.com

- Syahmin, AK. *Hukum Diplomatik : Suatu pengantar / AK Syahmin*. Bandung : Armico, 1988
- Hajdari, Ismet. 2021. *Washington Agreement is (not) an Internationally Binding Bilateral Treaty, EUROPEAN PERSPECTIVES – INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ON EUROPEAN PERSPECTIVES Volume 12, Nomor 2 (22), Oktober 2021, PP. 57-79*
- Hart, Carrie. “Israel’s emerging ties with Kosovo in the Balkans,” *timesofisrael*, 2 Februari 2021 <https://blogs.timesofisrael.com/israels-emerging-ties-with-kosovo-in-the-balkans/>
- Hosmer, Stephen T., “Why Milosevic Decided to Settle the Conflict Over Kosovo When He Did, RAND Corporation,” RB-71, 2001. As of August 4, 2023: [https://www.rand.org/pubs/research\\_briefs/RB71.html](https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB71.html)
- Hospita, Maria Elisa. “ANALISIS - Perjanjian Kosovo-Serbia banyak gimik, minim substansi,” *AA*, 9 September 2020, <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/analisis-perjanjian-kosovo-serbia-banyak-gimik-minim-substansi/1974753>
- Jegic, Denijal. “Kesepakatan normalisasi Kosovo-Serbia yang diusung Trump adalah soal Israel,” *aljazeera*, 28 September 2020. *Trump’s Kosovo-Serbia normalisation deal is all about Israel | Opinions | Al Jazeera*
- Jonathan, Hans. “Konflik Serbia-Kosovo: Ekspansi Pengaruh Amerika Serikat di Tanah Balkan,” *goodnewsfromindonesia*, 25 Oktober 2023. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/10/25/konflik-serbia-kosovo-ekspansi-pengaruh-amerika-serikat-di-tanah-balkan>
- Jonshala. “Signing of agreement”, *KIDIC.net*, 22 Maret 2022. <https://kidic.net/singing-of-agreement/>
- Jonshala. “Floil Company”, *KIDIC.net*, 22 Juli 2022. <https://kidic.net/floil-company/>
- Jonshala. “KIDIC & GRAPOILA”, *KIDIC.net*, 22 Agustus 2022. <https://kidic.net/kidic-grapoila/>
- Jonshala. “Meeting with the Minister of Defence of Albania”, *KIDIC.net*, 29 November 2022. <https://kidic.net/meeting-with-the-minister-of-defence-of-albania/>
- Karcic, Harun. “Serbia, Palestinians and ‘Secessionists’: Why Israel Took So Long to Commit to Kosovo”<sup>16</sup> Februari 2021, <https://www.haaretz.com/israel-news/2021-02-16/ty-article-opinion/.premium/israel-kosovo-trump-palestinians/0000017f-e94e-d639-af7f-e9df20230000>
- KIDIC. 2021. *Kosovo Israel Development & Investment Corporation*. <https://kidic.net/>

- KIDIC. 2024. Kosovo Israel Development & Investment Corporation. <https://kidic.net/>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Isu Kosovo," 15 November 2019 , <https://kemlu.go.id/kebijakan/isu-khusus/isu-kosovo?type=publication>
- Mizroch, Amir. "Israel won't recognize Kosovo, for now," *Jerusalem Post*, 19 Februari 2008, *Israel won't recognize Kosovo, for now - The Jerusalem Post (jpost.com)*
- Nezaj, Novitet Xh. 2015. The development of Kosovo and its relationship: with the EU, Discussion Paper, No. 4/15, Europa-Kolleg Hamburg, Institute for European Integration, Hamburg, <http://hdl.handle.net/10419/110956>
- Ningsih, Widya Lestari. "Perang Kosovo: Penyebab, Intervensi NATO, dan Dampaknya," *Kompas.com*, 26 Januari 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/26/130000479/perang-kosovo--penyebab-intervensi-nato-dan-dampaknya?page=all>
- Plano, Jack D dan Roy Olton, *The International Dictionary*, Fourth Edition, Clio Press Ltd. England, 1988.
- Republic Of Türkiye Ministry Of Foreign Affairs. Press Release Regarding the Opening of the Embassy of Kosovo in Jerusalem, No: 98, 14 Maret 2021, Press Release Regarding the Opening of the Embassy of Kosovo in Jerusalem / Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs ([mfa.gov.tr](http://mfa.gov.tr))
- Republic Of Türkiye Ministry Of Foreign Affairs "Relations between Türkiye and Kosovo," 14 Maret 2021, [https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-kosovo\\_.en.mfa](https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-kosovo_.en.mfa)
- Saputra, Eka Yudha. "Kosovo Mau Pindahkan Kedubesnya di Israel ke Yerusalem, Asal," *Tempo*, 22 September 2018, <https://dunia.tempo.co/amp/1129026/kosovo-mau-pindahkan-kedubesnya-di-israel-ke-yerusalem-asal>.
- Syahmin, AK. 1988. *Hukum diplomatik : suatu pengantar*. Bandung : Armico
- United Nations Security Council Resolutions. Resolution 478 Territories occupied by Israel, 20 August 1980. Security Council Resolution 478 - UNSCR
- United States Mission to the United Nations. Remarks at a UN Security Council Briefing on Kosovo, 30 Oktober 2024. <https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-kosovo-7/>
- U.S. Embassy in Kosovo. "Ambassador Hovenier's Message on Kosovo's 14th Independence" Day, 17 Februari 2022, <https://xk.usembassy.gov/kosovo14/#:~:text=So%2C%20today%2C%20we%20stand%20beside,Happy%20Independence%20Day%20Kosovo!>

VOA Indonesia, "Kosovo Langsung Pemilu," 8 Juni 2014, Kosovo Langsung Pemilu (voaindonesia.com) Israel-Palestina?," 15 Maret 2021, <https://www.wartaekonomi.co.id/read332187/kedubes-kosovo-telah-hadir-di-yerusalem-perdalam-konflik-israel-palestina>.

Warta Ekonomi, "Kedubes Kosovo Telah Hadir di Yerusalem, Perdalam Konflik Israel-Palestina?," 15 Maret 2021 Kedubes Kosovo Telah Hadir di Yerusalem, Perdalam Konflik Israel-Palestina? (wartaekonomi.co.id)

Yeshayahou, Kobi. "Enlight buys rights to Kosovo wind farm project," GLOBES, 14 Maret 2018. <https://en.globes.co.il/en/article-enlight-buys-rights-to-kosovo-wind-farm-project-1001227695>

Young, Antonia. "Kosovo self-declared independent country," Britannica, 7 April 2021, <https://www.britannica.com/place/Kosovo>.

Zulfikar, Fahri. "Daftar 9 Negara yang Tidak Diakui PBB, Palestina Termasuk," detik.com, 27 Maret 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7263091/daftar-9-negara-yang-tidak-diakui-pbb-palestina-termasuk>